



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASRUL SELANG
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 136619

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.471.414.000

1. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 55.200.000
2. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 82.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 120.070.000
4. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 26.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/148 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 163.064.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 174.080.000
7. Bangunan Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 186.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR FU 150SCD2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 268.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 214.405.945



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.139.819.945
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.139.819.945

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.